
Feminisasi Maritim Di Kawasan Tempat Pelelangan Ikan Lappa Kabupaten Sinjai

Sopian Tamrin¹, Syamsu A Kamaruddin², Arlin Adam³

Institusi : Universitas Negeri Makassar^{1,2}, Universitas Pejuang Republik Indonesia Makassar³

Email : sopiantamrin@unm.ac.id

Diterima	14	Mei	2025
Disetujui	31	Desember	2025
Dipublish	31	Desember	2025

Abstract

Fishing labor remains predominantly male-dominated across nearly all maritime societies, including Lappa Village in Sinjai Regency. Women are often confined to domestic roles as homemakers, reinforcing gendered role constructions that perpetuate the domestication of women. This study seeks to uncover the dynamics of male dominance in maritime labor through the lens of Raewyn Connell's theory of hegemonic masculinity. Employing a qualitative descriptive approach, data were collected via observation, interviews, and field documentation. Findings reveal that maritime labor in Lappa Village is exclusively dominated by men, encompassing roles as *punggawa* (boat owners/leaders) and *sawi* (crew members). No women are directly involved in fishing activities. However, the establishment of the Fish Auction Place (TPI) in Lappa Village has opened socio-economic opportunities for women, enabling their participation in the maritime ecosystem. At the TPI, women contribute by managing eateries, with roles ranging from business owners and property lessors to food vendors or workers. The study concludes that while hegemonic masculinity persists, its influence is limited. Patriarchal structures in this maritime community do not entirely restrict women's agency, leaving room for role negotiation between genders in complex social contexts. The TPI facilitates the feminization of the maritime sector, positioning women as active contributors to socio-economic activities. This underscores the coexistence of traditional gender norms and emergent spaces for female empowerment, challenging monolithic interpretations of patriarchy in maritime societies.

Keywords: *Women, Maritime, Hegemonic Masculinity, Feminization*

Abstrak

Pekerjaan sebagai nelayan masih didominasi oleh aktor laki-laki. Hal tersebut terlihat pada hampir semua Masyarakat maritim, termasuk di desa Lappa Kabupaten Sinjai. Perempuan tidak jarang hanya berdiam di rumah sebagai ibu rumah tangga. Sehingga tidak jarang konstruksi peran melanggengkan proses domestifikasi bagi perempuan. Penelitian ini berupaya menyingkap bagaimana dominasi laki-laki dalam kerangka kerja kemaritiman melalui analisis teori hegemoni maskulinitas dari Raewyn Connel. Penelitian ini merupakan jenis kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui kegiatan observasi, wawancara dan pendokumentasian situasi lapangan. Hasil menunjukkan bahwa sektor kemaritiman telah didominasi oleh laki-laki sebagai nelayan; baik mereka yang berperan sebagai *punggawa* maupun sebagai *sawi*. Sama sekali tidak ada Perempuan yang terlibat dalam pekerjaan sebagai nelayan. Namun, dengan keberadaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Desa Lappa Sinjai telah menganalisis ruang kehidupan social ekonomi terutama bagi perempuan. Di Kawasan TPI,



Perempuan muncul sebagai pihak yang menopang ekosistem kawasan dengan mendirikan rumah makan. Hanya saja mereka memilih kondisi yang bergaman, ada yang berperan sebagai pemilik usaha rumah makan, ada pemilik tempat dan ada juga yang hanya sebagai pekerja rumah makan atau berjualan. Penelitian menyimpulkan bahwa memang terjadi maskulinitas hegemonik tapi sifatnya terbatas. Hegemoni tidak menguasai keseluruhan kompleksitas kegiatan ekonomi maritim. Artinya patriarki yang tumbuh ditengah masyarakat tidak mengekang seutuhnya namun tetap terbuka adanya negosiasi peran antara laki-laki dan Perempuan pada kehidupan social yang lebih kompleks. Pada akhirnya TPI Lappa mendorong feminisasi sektor kemaritiman yang menjadikan Perempuan sebagai aktor yang berkontribusi dalam kegiatan social dan ekonomi.

Kata kunci: Perempuan, Maritim, Hegemoni Maskulinitas, Feminisasi

Pendahuluan

Sektor kemaritiman global masih didominasi oleh laki-laki, mencerminkan ketimpangan gender yang sistemis. Data FAO (2020) menunjukkan bahwa 90% pekerja di bidang perikanan dan kelautan di seluruh dunia adalah laki-laki. Perempuan seringkali terpinggirkan dalam peran informal seperti pengolahan ikan atau perdagangan skala kecil. Fenomena ini tidak hanya terjadi di negara berkembang, tetapi juga di negara maju seperti Norwegia, di mana hanya 12% perempuan bekerja sebagai nelayan (Gerrard, 2021).

Dominasi ini berakar pada konstruksi budaya yang mengaitkan pekerjaan maritim dengan atribut maskulin seperti kekuatan fisik, keberanian, dan risiko tinggi. Studi Harper et al. (2020) di Marine Policy mengungkap bahwa mitos "laut adalah wilayah laki-laki" masih dipertahankan melalui tradisi lisan dan kebijakan yang bias gender. Akibatnya, perempuan kehilangan akses terhadap sumber daya ekonomi strategis seperti kepemilikan kapal atau teknologi penangkapan ikan.

Marginalisasi perempuan dalam sektor maritim berimplikasi pada kemiskinan struktural. Laporan Bank Dunia (2021) memperkirakan bahwa inklusi gender di sektor kelautan dapat meningkatkan PDB global hingga \$1,5 triliun per tahun. Namun, minimnya representasi perempuan dalam pengambilan keputusan maritim hanya 5% pemimpin organisasi perikanan dunia adalah Perempuan memperlambat pencapaian tujuan tersebut (UN Women, 2022).

Di Indonesia, ketimpangan gender di sektor maritim tercermin dari data BPS (2022): 85% pekerja perikanan adalah laki-laki. Perempuan hanya mendominasi pekerjaan sekunder seperti pengasapan ikan (30%) dan penjualan ikan tradisional (45%). Padahal, Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki potensi maritim yang besar, dengan 65% penduduk pesisir bergantung pada sektor ini (KKP, 2023). Masyarakat maritim di Indonesia, kaya akan sumber daya kelautan namun sering kali masih tergolong miskin (Anwar, Z., & Wahyuni, W., 2019).

Budaya patriarki di wilayah pesisir Indonesia mengabadikan stereotip bahwa perempuan "lemah" untuk bekerja di laut. Penelitian Kusnadi (2018) di Jawa Timur menemukan bahwa 78% masyarakat pesisir percaya perempuan tidak pantas menjadi nelayan karena dianggap membawa sial atau mengganggu keseimbangan alam. Keyakinan ini diperkuat oleh norma adat dan praktik keagamaan yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin rumah tangga.

Kebijakan pemerintah seperti Program Nelayan Andalan masih fokus pada pelatihan teknis untuk laki-laki, sementara perempuan hanya mendapat pelatihan pengolahan ikan (Setyawati, 2020). Hal ini mengabaikan potensi perempuan dalam inovasi maritim, seperti pengembangan ekowisata pesisir atau teknologi pengawetan ikan ramah lingkungan.

Di Kelurahan Lappa, Kabupaten Sinjai, dominasi laki-laki dalam sektor maritim mencapai 97% (BPS Sinjai, 2022). Tidak ada



satupun perempuan yang tercatat sebagai nelayan, baik sebagai pemilik kapal (punggawa) maupun awak kapal (sawi). Kondisi ini memperlihatkan bagaimana hegemoni maskulinitas bekerja secara ketat di tingkat lokal.

Perempuan di Lappa terjebak dalam peran domestik: 80% menghabiskan waktu untuk mengurus rumah tangga dan merawat anak (Dinas PPPA Sinjai, 2023). Studi lapangan menunjukkan bahwa hanya 15% perempuan yang terlibat dalam kegiatan ekonomi produktif, seperti membuat kerajinan dari limbah ikan, namun itu pun dianggap sebagai "pekerjaan sampingan" (Wawancara Tokoh Masyarakat, 2023).

Keberadaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lappa membuka peluang ekonomi bagi perempuan, dengan 65% usaha rumah makan dikelola oleh perempuan (Dinas Perikanan Sinjai, 2023). Namun, kepemilikan lahan di sekitar TPI masih didominasi laki-laki (70%), membatasi ruang gerak perempuan untuk berkembang (Prasetyawati, 2021).

Kondisi ideal menuntut kesetaraan akses bagi perempuan dalam kepemilikan kapal, teknologi penangkapan ikan, dan pelatihan kemaritiman. FAO (2020) merekomendasikan program pemberdayaan berbasis gender, seperti kuota 30% perempuan dalam keanggotaan koperasi nelayan. Perempuan harus diakui sebagai aktor utama dalam rantai nilai maritim, bukan hanya sebagai "pendukung". Contoh sukses terjadi di Filipina, di mana perempuan menguasai 40% usaha pengolahan ikan ekspor melalui koperasi inklusif (Resurreccion & Ha, 2017).

Penelitian terdahulu tentang hegemoni maskulinitas di sektor maritim, seperti karya Connell (2005), fokus pada relasi kuasa laki-laki di kapal. Namun, kajian ini kurang menyentuh dinamika di darat, seperti peran perempuan di TPI. Prasetyawati (2021) dan Setyawati (2020) mengkaji bagaimana perempuan memanfaatkan sektor informal

untuk melawan marginalisasi. Namun, penelitian ini masih terbatas pada konteks perkotaan, bukan pedesaan pesisir seperti Lappa. Selain itu, Penelitian Kusnadi (2018) mengeksplorasi perjuangan nelayan perempuan di Jawa, tetapi tidak membahas efek keberadaan TPI terhadap relasi gender. Studi ini juga tidak menggunakan perspektif hegemoni maskulinitas secara mendalam. Mayoritas penelitian mengabaikan bagaimana infrastruktur maritim (seperti TPI) bisa menjadi ruang negosiasi gender. Selain itu, tidak ada kajian yang menggabungkan analisis struktural (kebijakan) dan kultural (norma adat) dalam konteks lokal Sinjai.

Penelitian ini memperbarui kajian dengan mengintegrasikan teori hegemoni maskulinitas Connell (2005) ke dalam konteks pedesaan pesisir Indonesia, khususnya TPI Lappa. Pendekatan ini belum pernah dilakukan dalam studi sebelumnya. Kebaruan lain terletak pada analisis TPI sebagai ruang "hibrid" yang memungkinkan perempuan menegosiasikan peran di tengah dominasi laki-laki. Tempat ini menjadi studi kasus unik untuk memahami batasan dan peluang agensi perempuan.

Penelitian ini fokus pada dua hal: (1) Bagaimana hegemoni maskulinitas bekerja dalam pembagian peran di sektor maritim Lappa, dan (2) Bagaimana TPI menjadi ruang negosiasi gender bagi perempuan.

Studi ini penting untuk mengisi celah literatur tentang relasi gender di sektor maritim pedesaan, sekaligus memperkaya teori hegemoni maskulinitas dengan konteks non-Barat. Hasil penelitian dapat menjadi rekomendasi bagi pemerintah dalam merancang kebijakan maritim inklusif, seperti pelatihan teknis untuk perempuan atau reformasi kepemilikan lahan di sekitar TPI. Dengan demikian, tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) tentang kesetaraan gender dan pengentasan kemiskinan dapat tercapai.

Metode Penelitian



Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk mengungkap kompleksitas relasi gender dalam sektor kemaritiman di Desa Lappa. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali makna subjektif, praktik sosial, dan dinamika kekuasaan yang tidak terukur secara statistik Ishtiaq, M. (2019). Fokus pada teori hegemoni maskulinitas Raewyn Connell (2005) menjadi landasan analisis, dengan tujuan mendeskripsikan bagaimana dominasi laki-laki dipertahankan dan dinegosiasikan melalui interaksi sosial di lapangan. Jenis penelitian ini bersifat eksploratif, bertujuan memahami fenomena dari perspektif partisipan, seperti nelayan, perempuan pengelola rumah makan di TPI, dan tokoh adat.

Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama: observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Observasi dilakukan di dua lokus utama: area pelabuhan nelayan dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lappa, untuk merekam aktivitas kerja, interaksi gender, dan penggunaan ruang. Wawancara mendalam dilakukan terhadap 15 informan kunci, terdiri dari 8 nelayan laki-laki, 5 perempuan pengusaha rumah makan di TPI, dan 2 tokoh adat, dengan panduan pertanyaan terbuka yang terstruktur berdasarkan konsep hegemoni maskulinitas dan gender order. Studi dokumentasi meliputi arsip desa, foto aktivitas TPI, serta laporan Dinas Perikanan Sinjai (2023) untuk memperkuat validitas data. Triangulasi sumber dan metode dilakukan untuk memastikan keakuratan temuan.

Data dianalisis secara tematik dengan tahapan: (1) *open coding* untuk mengidentifikasi pola terkait praktik hegemoni maskulinitas (misalnya: pembagian peran, mitos budaya, kontrol sumber daya), (2) *axial coding* untuk menghubungkan tema dengan teori Connell (2005), dan (3) *selective coding* untuk menyusun narasi holistik tentang negosiasi gender di TPI. Analisis juga membandingkan data lapangan dengan temuan

penelitian sebelumnya (misalnya: Kusnadi, 2018; Prasetyawati, 2021) untuk mengidentifikasi kebaruan kontekstual. Software Atlas.ti digunakan untuk mengorganisir kode dan tema secara sistematis.

Keterbatasan utama penelitian terletak pada cakupan geografis yang terbatas (hanya Desa Lappa) dan subjektivitas dalam interpretasi data kualitatif. Untuk mengurangi hal ini, peneliti memperpanjang waktu observasi (2 bulan) dan melakukan triangulasi dengan data sekunder. Selain itu, fokus pada teori Connell mungkin mengabaikan perspektif feminis lain, tetapi hal ini diantisipasi dengan menyertakan catatan kritis dalam analisis. Hasil penelitian ini tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi, tetapi memberikan pemahaman mendalam tentang dinamika gender di komunitas

Hasil Penelitian

Konstruksi Peran gender di TPI Lappa

Penelitian ini mengungkapkan bahwa pembagian peran gender dalam aktivitas maritim di desa Lappa tidak berbeda jauh dengan pada Masyarakat maritim yang lain, di mana perempuan tidak terlibat langsung di sektor produktif seperti melaut, bekerja di kapal, atau menjadi nelayan. Keterlibatan perempuan terbatas pada aktivitas sekunder di darat, sementara laki-laki mendominasi seluruh aspek pekerjaan di laut. Temuan ini tidak hanya mencerminkan ketimpangan akses, tetapi juga menunjukkan bagaimana konstruksi sosial-budaya tentang gender, risiko, dan kemampuan fisik menjadi alat legitimasi untuk mempertahankan dominasi laki-laki di sektor maritim.

Sebagaimana hasil wawancara dengan ibu Fitri (Jumat 11 April, 2025) bahwa Perempuan tidak turun melaut karena pekerjaan di laut itu berisiko, harus kuat. Di Tengah laut sangat berbahaya untuk Perempuan dan kami



tidak sehebat laki-laki. Kondisi ini terkonfirmasi bahwa memang tidak ada satupun perempuan yang terlibat sebagai nelayan, awak kapal (sawi), atau pekerja kapal. Aktivitas seperti menangkap ikan, mengoperasikan alat tangkap, hingga memperbaiki kapal sepenuhnya dijalankan oleh laki-laki.

Fenomena ini tidak hanya terjadi di tingkat praktis, tetapi juga direproduksi melalui narasi budaya yang mengaitkan kepantasan perempuan dengan ketidakmampuan fisik dan kerentanan terhadap risiko. Terdapat stereotip tentang "kodrat perempuan" untuk mengarahkan mereka ke sektor tertentu. Contoh: anggapan bahwa perempuan "lebih teliti" dalam mengelola uang digunakan untuk membenarkan peran mereka sebagai pedagang eceran, tetapi tidak sebagai pemilik kapal.

Pernyataan di atas menunjukkan internalisasi norma gender yang menempatkan perempuan sebagai kelompok yang perlu dilindungi dari bahaya, sekaligus mengukuhkan anggapan bahwa kekuatan fisik adalah syarat mutlak untuk bekerja di laut sebuah konsep yang secara tidak langsung mengesampingkan perempuan.

Selain itu, pihak laki-laki juga menegaskan pandangan tersebut, hal ini diungkapkan oleh Irwansyah (12 Maret 2025) bahwa pekerjaan di laut digambarkan sebagai aktivitas berbahaya yang penuh ketidakpastian, seperti cuaca ekstrem, kecelakaan kapal, atau risiko tenggelam. Narasi ini digunakan untuk membenarkan pembatasan akses Perempuan. Perempuan tidak dibiarkan bekerja di laut, kasihan, banyak kecelakaan di laut.

Meski terkesan melindungi, narasi ini justru mengabaikan agensi perempuan dan mengabadikan ketergantungan mereka pada laki-laki. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa kemampuan fisik dijadikan syarat mutlak untuk bekerja di laut, meskipun banyak pekerjaan maritim (seperti mengelola alat tangkap atau navigasi) sebenarnya membutuhkan keterampilan teknis, bukan hanya kekuatan

otot. Mitos ini mengabaikan potensi perempuan untuk beradaptasi atau menggunakan teknologi yang meminimalisir beban fisik.

Perempuan dianggap tidak memiliki kekuatan fisik yang memadai untuk bekerja di laut, seperti mengangkat jaring, menarik kapal, atau bertahan dalam kondisi cuaca ekstrem. Narasi ini mengabaikan fakta bahwa banyak pekerjaan maritim (misalnya, navigasi atau pengelolaan alat tangkap) lebih membutuhkan keterampilan teknis daripada kekuatan otot. Namun, mitos "perempuan lemah" tetap digunakan untuk mengesahkan eksklusi mereka dari aktivitas produktif bernilai tinggi.

Aktivitas melaut digambarkan sebagai wilayah berbahaya yang tidak pantas bagi perempuan. Seperti diungkapkan nelayan laki-laki, "Laut itu keras, banyak kecelakaan. Kasihan kalau perempuan ikut" (Akmal, 12 Maret 2025). Narasi "perlindungan" ini bersifat paradoks: di satu sisi, ia mengklaim menjaga keselamatan perempuan, tetapi di sisi lain, ia justru melanggengkan ketergantungan perempuan pada laki-laki sebagai "penjaga" dan "penopang" ekonomi.

Kedua narasi ini berfungsi sebagai alat kontrol sosial untuk mengalokasikan perempuan ke ruang domestik atau semi-publik, sementara laki-laki menguasai sektor maritim yang lebih menguntungkan.

Keluarga cenderung melarang perempuan bekerja di laut karena khawatir dicemooh atau dianggap "tidak sesuai kodrat" Selain itu, Tidak ada kapal atau alat tangkap yang dirancang untuk memfasilitasi partisipasi perempuan, seperti sistem kerja shift yang lebih fleksibel atau alat bantu fisik.

Keterlibatan perempuan dalam aktivitas sekunder ini memperkuat ketimpangan gender yang sistemik.

Pertama, pekerjaan mereka dianggap sebagai perluasan peran domestik, sehingga tidak dinilai sebagai "pekerjaan profesional" layaknya aktivitas melaut yang didominasi laki-laki. Kedua, terdapat disparitas upah yang



mencolok. Seperti disoroti Aida (12 Maret 2025), "Kalau sawi (awak kapal) laki-laki biasanya kisaran Rp500 ribu sehari, sedangkan pekerja perempuan di rumah makan kisaran Rp35–70 ribu." Perbedaan ini menunjukkan bahwa pekerjaan laki-laki di laut dihargai 7–14 kali lipat lebih tinggi, meskipun perempuan juga bekerja dalam durasi yang sama.

2. Peran Perempuan di Kawasan TPI

Meskipun Perempuan sepertinya sulit untuk mengambil peran di kegiatan melaut dan aktivitas sejenisnya, namun keberadaan Kawasan pelelangan Ikan Lappa menjadikan Perempuan tetap memiliki aktivitas yang berpenghasilan. Keterlibatan mereka dapat dikategorikan dalam tiga bidang utama:

1) Pekerja atau Pemilik Rumah Makan

Banyak perempuan bekerja di rumah makan yang melayani nelayan, pedagang, dan pekerja pelabuhan. Aktivitas ini mencakup memasak, menyajikan makanan, dan membersihkan, yang secara kultural dianggap sebagai "perpanjangan peran domestik" perempuan. Seperti diungkapkan Ibu Fatmawati (11 Maret 2025), "Kami kerja di rumah makan karena ini lebih cocok untuk kami dibanding pergi mencari ikan," pernyataan ini merefleksikan norma gender yang mengaitkan perempuan dengan ruang privat dan tugas-tugas pengasuhan. Meskipun pekerjaan ini dianggap "sesuai kodrat", jam kerjanya panjang (biasanya dari pagi hingga malam), dengan upah rendah dan minim perlindungan sosial.

Kondisi Perempuan sebagai di sektor kuliner sebenarnya tidak Tunggal. Mereka juga memiliki kategori yang berbeda-beda. Misalnya ada Perempuan yang bekerja di sektor kuliner sebagai pemilik usaha seperti bu Fitriani, dan surianti, namun mereka menyewa tempat yang notabene adalah milik orang lain. Namun ada juga seperti ibu Hj. Uli, Ibu Unang, Ibu Masyita, Ibu Kus, Ibu Mardiana selain menjalankan usaha kuliner sekaligus pemilik tempat (milik sendiri). Selain itu, terdapat

beberapa Perempuan bekerja sebagai pegawai rumah makan dan pedagang di sekitaran pelelangan.

2) Pedagang Ikan (Eceran atau Perantara)

Perempuan berperan sebagai pedagang ikan eceran atau perantara yang membeli ikan dari pelelangan untuk dijual kembali ke pasar lokal atau konsumen langsung. Aktivitas ini sering kali bersifat informal dan tidak terikat dengan sistem pelelangan resmi, sehingga pendapatannya tidak stabil. Sebagai perantara, mereka menghubungkan nelayan dengan pasar ritel, tetapi posisi ini rentan terhadap fluktuasi harga dan ketergantungan pada pasokan ikan dari nelayan laki-laki. Peran ini juga membutuhkan waktu lama untuk menunggu hasil lelang, namun tidak diimbangi dengan jaminan keuntungan yang signifikan.

3) Penjual Kue atau Kebutuhan Harian

Perempuan juga mengisi sektor informal lain dengan berjualan kudapan, air mineral, atau barang kebutuhan sehari-hari di sekitar pelabuhan. Aktivitas ini bersifat subsisten dan hanya bertujuan memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Meski penting bagi keberlangsungan aktivitas pelabuhan, kontribusi mereka sering dianggap remeh karena skalanya yang kecil dan tidak terintegrasi dengan rantai nilai utama.

Adapun informasi profil singkat informan bisa dilihat pada table di bawah ini;

Tabel.1 Profil Informan

N o	Nama	Us ia	Pekerj aan	Kepemil ikan tempat	Kisaran penghas ilan
1.	Fitriani	46	Pemilik Rumah Makan	Sewa	500-700/hr
2.	Aisyah	70	Pedagang	sewa	40-100/hr
3.	Nursyiah	69	Penjual Pakaiannya		Min. 100/hr
4.	Fatmawati	48	Pekerja Rumah Makan	-	50-100/hr
5.	Hj. Uli	54	Pemilik	Milik sendiri	300-500/hr



			Rumah Makan		
6.	Ibu Unang	60	Pemilik Rumah Makan	Milik sendiri	300-500/hr
7.	Ibu Sahe	54	Pekerja Rumah Makan	-	40-70/hr
8.	Mutajah idah	26	Penjual Campuran	-	60-100/hr
9.	Ibu Masyita	49	Pemilik Rumah Makan	Milik sendiri	300-500/hr
10.	Ibu Surianti	50	Pemilik usaha,	Sewa	200-300/hr
11.	Ibu Kus	56	Pemilik Rumah Makan	Milik sendiri	300-500/hr
12.	Mutajah idah	26	Penjual Campuran	-	60-100/hr
13.	Ibu Mardiana	50	Pemilik Rumah Makan	Milik sendiri	300-500/hr
14.	Ibu Ros	52	Penjual Ikan	-	50-100/hr

Pembahasan

Hegemoni Maskulinitas Pelelangan Lappa

Temuan di atas selaras dengan teori hegemonic masculinity (Connell, 1987), di mana laki-laki mempertahankan dominasi mereka di sektor strategis melalui kontrol atas sumber daya, narasi budaya, dan legitimasi sosial. Di Pelelangan Lappa, pekerjaan maritim dianggap sebagai domain eksklusif laki-laki karena dua alasan utama: (1) kontrol atas teknologi dan alat produksi (kepemilikan kapal, jaring, mesin), dan (2) legitimasi kultural yang mengaitkan maskulinitas dengan kekuatan fisik dan keberanian. Joan Acker (1990) dalam *Hierarchies, Jobs, Bodies: A Theory of Gendered Organizations* menegaskan bahwa dominasi laki-laki dipertahankan melalui

struktur institusional yang mengalokasikan sumber daya strategis ke tangan mereka. Hal ini terlihat jelas dalam monopoli laki-laki atas kapal di Lappa, yang menjadi alat produksi utama di sektor maritim.

Teori hegemoni maskulinitas (Connell, 1987) menjelaskan bagaimana dominasi laki-laki dipertahankan melalui norma sosial yang menganggap pekerjaan tertentu seperti melaut sebagai ranah eksklusif laki-laki. Temuan bahwa perempuan masih menganggap pekerjaan berat sebagai pekerjaan laki-laki menunjukkan bahwa hegemoni ini tidak hanya dipaksakan oleh laki-laki, tetapi juga diinternalisasi oleh perempuan sendiri. Pernyataan Fitriani (Perempuan tidak turun melaut karena pekerjaan di laut itu berisiko, harus kuat) dan Irwansyah (Perempuan tidak dibiarkan bekerja di laut, kasihan) mencerminkan bagaimana narasi "perlindungan" justru mengukuhkan pembagian peran yang timpang. Sandra Harding (1986) dalam *The Science Question in Feminism* menjelaskan bahwa internalisasi norma gender adalah hasil dari standpoint sosial yang dikonstruksi oleh sistem patriarki. Dengan kata lain, perempuan menerima peran subordinat karena sistem pengetahuan yang dominan mengabadikan stereotip tersebut.

Namun, hegemoni ini tidak mutlak. Meski perempuan tersingkir dari aktivitas melaut, mereka masih memiliki akses ke ruang publik ekonomi di sekitar Tempat Pelelangan Ikan (TPI), seperti berdagang atau mengelola rumah makan. Iris Marion Young (2011) dalam *Justice and the Politics of Difference* menyebut fenomena ini sebagai *differentiated citizenship*, di mana kelompok marginal diizinkan berpartisipasi dalam ruang tertentu selama tidak mengganggu struktur dominasi. Ini menunjukkan bahwa maskulinitas hegemoni di Pelelangan Lappa bersifat terbatas tidak sepenuhnya mengekang perempuan, tetapi membatasi mereka pada sektor-sektor yang dianggap "feminin" (rendah risiko, cenderung



rendah pendapatan). Diane Elson (2017) menambahkan bahwa sektor feminin sengaja dipertahankan sebagai zona berupah rendah untuk memastikan ketergantungan ekonomi perempuan pada laki-laki.

Teori maskulinitas hegemonik yang digagas oleh R.W. Connell (1987) menawarkan lensa kritis untuk memahami dinamika gender di Pelelangan Lappa. Connell menegaskan bahwa maskulinitas bukanlah konsep tunggal, melainkan hierarki yang dibentuk melalui relasi kuasa dan konteks sosial-budaya. Pierre Bourdieu (2001) dalam *Masculine Domination* memperkuat argumen ini dengan menyatakan bahwa dominasi maskulin direproduksi melalui praktik simbolik yang mengukuhkan perbedaan gender sebagai kodrat. Di Pelelangan Lappa, hierarki ini terlihat dalam pembagian peran gender: laki-laki mendominasi aktivitas inti maritim seperti melaut dan menjadi sawi (awak kapal), sementara perempuan dialokasikan ke sektor pendukung seperti perdagangan ikan eceran atau jasa kuliner.

Dominasi laki-laki di sektor inti ini dipertahankan melalui narasi budaya yang mengaitkan maskulinitas dengan kekuatan fisik, keberanian, dan kemampuan menghadapi risiko. Misalnya, nelayan laki-laki kerap menggunakan argumen seperti perempuan tidak kuat menghadapi kehidupan di tengah laut atau laut terlalu berbahaya untuk perempuan untuk membenarkan eksklusi perempuan dari aktivitas produktif bernilai ekonomi tinggi. Silvia Federici (2012) dalam *Revolution at Point Zero* mengkritik bahwa narasi risiko dan perlindungan sering digunakan untuk mengaburkan eksploitasi ekonomi atas tubuh Perempuan. Padahal, banyak pekerjaan maritim seperti navigasi atau pengelolaan alat tangkap lebih membutuhkan keterampilan teknis daripada kekuatan otot semata. Judy Wajcman (1991) dalam *Feminism Confronts Technology* menegaskan bahwa maskulinisasi teknologi maritim adalah strategi untuk meminggirkan perempuan dari akses ke pengetahuan teknis.

Narasi ini tidak hanya mengabadikan stereotip gender, tetapi juga mengukuhkan maskulinitas hegemonik sebagai standar ideal yang sulit ditandingi.

Feminisasi Maritim di Kawasan Pelelangan Lappa

Di balik dominasi maskulinitas dalam kegiatan maritim, kompleksitas ekosistem Pelelangan Lappa justru menciptakan celah bagi perempuan untuk berpartisipasi. Mobilitas sosial yang intens di kawasan pelelangan memungkinkan perempuan mengisi ruang sosial yang tersedia melalui aktivitas ekonomi non-maritim. Naila Kabeer (1999) menjelaskan bahwa ruang publik yang terfragmentasi sering kali menyediakan celah bagi perempuan untuk mengakses sumber daya ekonomi, meski dalam kerangka patriarki. Perkembangan rumah makan dan pasar di kawasan pelelangan menjadi contoh nyata: perempuan mengambil peran sebagai penjual, pekerja rumah makan, hingga pemilik usaha. Fenomena ini sejalan dengan konsep James C. Scott (1985) tentang *everyday resistance*, di mana kelompok subordinat memanfaatkan celah dalam sistem dominasi untuk bertahan hidup tanpa konflik terbuka.

Banyak perempuan di Lappa mengambil peran strategis dalam rantai distribusi dan konsumsi, seperti menjadi pedagang perantara ikan atau pengelola rumah makan. Meski aktivitas ini dianggap sebagai perpanjangan peran domestik yang sesuai stereotip femininitas misalnya, ketelitian mengelola uang atau pengasuhan melalui penyediaan makanan mereka berhasil mengubahnya menjadi sumber penghasilan. Raewyn Connell (2005) mencatat bahwa stereotip gender sering kali dimanipulasi oleh perempuan untuk menciptakan ruang ekonomi yang tidak mengancam hegemoni laki-laki. Namun, kontribusi ekonomi ini tidak dihargai setara: upah harian pekerja perempuan



di sektor sekunder hanya Rp35.000–70.000, jauh di bawah upah sawi laki-laki (Rp500.000). Silvia Federici (2012) mengkritik fenomena ini sebagai devaluation of reproductive labor, di mana pekerjaan yang diasosiasikan dengan femininitas sengaja direndahkan nilainya untuk mempertahankan hierarki gender.

Patriarki dalam masyarakat maritim Lappa tidak bersifat opresif total, melainkan fleksibel: ia membatasi perempuan di sektor strategis (seperti melaut), tetapi memberi toleransi selama partisipasi mereka tidak mengganggu dominasi maskulin. Sylvia Walby (1990) menyebut ini sebagai patriarchal bargaining, di mana perempuan bernegosiasi dalam batas yang ditetapkan sistem untuk memaksimalkan keuntungan minimal. Fleksibilitas ini terlihat dari cara masyarakat menerima perempuan di ruang publik asalkan tidak melanggar batas, seperti menjadi nelayan. Namun, Saba Mahmood (2005) mengingatkan bahwa agen perempuan tidak selalu bertujuan melawan patriarki; mereka bisa mereproduksinya sambil mencari keuntungan parsial. seperti kasus perempuan Lappa yang menguatkan stereotip feminin untuk legitimasi ekonomi.

Kontribusi perempuan di sektor sekunder sering menjadi tulang punggung ekonomi keluarga. Seperti diungkapkan Aida, pekerja rumah makan: Perempuan di sini yang membayar biaya sekolah anak dan memenuhi kebutuhan harian. Tapi, penghasilan kami disebut 'tambahan'. Pernyataan ini mengungkap paradoks: meski menjadi penopang ekonomi nyata, peran perempuan tetap dipinggirkan dalam narasi sosial. Arlie Hochschild (1989) menyebut ini the second shift beban ganda perempuan yang bekerja di publik tetapi tetap dibebani tanggung jawab domestik. Diane Elson (2017) menambahkan bahwa "pekerjaan perempuan sering dianggap 'non-produktif' karena tidak masuk dalam hitungan PDB formal, memperkuat marginalisasi mereka.

Implikasi temuan ini adalah dualitas

dalam sistem patriarki: di satu sisi, hierarki gender yang kaku mereproduksi ketimpangan melalui upah rendah dan marginalisasi; di sisi lain, partisipasi perempuan di sektor pendukung membuka peluang perlawanan. Jaringan sosial yang dibangun melalui perdagangan bisa menjadi basis pengembangan modal sosial, seperti yang dijelaskan Pierre Bourdieu (1986) tentang social capital as a tool for empowerment. Selain itu, ketergantungan laki-laki pada perempuan dalam rantai distribusi menunjukkan bahwa dominasi maskulin tidak absolut ia bergantung pada kontribusi terselubung perempuan. Nancy Fraser (2013) mengkritik bahwa patriarki kapitalis mengandalkan eksploitasi kerja perempuan untuk menopang sistem ekonomi yang secara formal dikendalikan laki-laki.

Konsep Connell (1987) tentang maskulinitas hegemonik terlihat jelas dalam kontrol laki-laki atas ruang maritim. Laut bukan hanya sumber ekonomi, tetapi juga simbol kekuasaan dan identitas maskulin. Dengan mengeksklusi perempuan, laki-laki mempertahankan klaim atas laut sebagai wilayahnya, sekaligus mengukuhkan superioritas gender melalui narasi perlindungan dan kapasitas fisik. Bourdieu (2001) dalam Masculine Domination menegaskan bahwa ruang fisik seperti laut sering menjadi medan simbolik untuk menegaskan dominasi gender. Namun, temuan di Lappa menunjukkan bahwa ruang ini tidak sepenuhnya tertutup—perempuan menggeser makna TPI dari zona maskulin menjadi ruang hibrid melalui aktivitas ekonomi.

Patriarki yang Kontekstual: Antara Pembatasan dan Peluang

Penelitian ini mengungkapkan bahwa patriarki dalam masyarakat maritim di sekitar Pelelangan Lappa tidak bersifat absolut, melainkan kontekstual dan dinamis. Patriarki di sini beroperasi dengan logika yang fleksibel: membatasi perempuan di sektor-sektor strategis



(seperti aktivitas maritim langsung) sambil memberi ruang terbatas bagi partisipasi mereka di sektor lain (perdagangan, jasa) yang tidak mengancam dominasi laki-laki. Temuan ini menunjukkan bahwa sistem patriarki tidak selalu mengekang secara total, tetapi mengatur peran gender melalui mekanisme selektif yang mempertahankan hierarki maskulin sekaligus memanfaatkan kontribusi perempuan untuk keberlangsungan ekonomi lokal. Sylvia Walby (1990) menjelaskan bahwa patriarki bukanlah sistem monolitik, melainkan serangkaian struktur yang saling terkait mulai dari rumah tangga hingga pasar yang dapat beradaptasi dengan perubahan sosial ekonomi. Fleksibilitas ini memungkinkan patriarki bertahan meski menghadapi tekanan transformasi sosial. Naila Kabeer (1999) menambahkan bahwa "patriarki seringkali merekonfigurasi diri dengan memanfaatkan kontribusi ekonomi perempuan tanpa mengganggu struktur kekuasaan yang ada, sebuah fenomena yang terlihat jelas di Lappa.

Temuan ini memperkaya teori patriarki dengan menunjukkan bahwa sistem ini bisa beradaptasi dengan konteks sosial-ekonomi setempat. Di Pelelangan Lappa, patriarki tidak menghapus peran perempuan sama sekali, tetapi mengatur partisipasi mereka sesuai kepentingan struktur dominasi. Konsep ini sejalan dengan pemikiran Walby (1990) yang menyatakan, patriarki dapat memoderasi tingkat kontrolnya terhadap perempuan tergantung pada kebutuhan sistem ekonomi; ia bisa membuka celah partisipasi terbatas tanpa mengganggu hierarki gender. Dengan demikian, perempuan diizinkan berkontribusi di sektor jasa selama tidak menggeser posisi laki-laki sebagai pemegang otoritas utama. James C. Scott (1985) dalam *Weapons of the Weak* menguatkan argumen ini dengan menyebut bahwa dominasi kelompok elit sering kali memungkinkan ruang terbatas bagi subordinat untuk berpartisipasi, asalkan tidak mengancam status quo.

Aktivitas dagang memberi perempuan akses ke jaringan pasar dan relasi sosial yang bisa dimanfaatkan untuk advokasi hak-hak ekonomi. Kabeer (1999) menekankan bahwa akses terhadap jaringan ekonomi adalah langkah awal bagi perempuan untuk membangun bargaining power dalam rumah tangga dan masyarakat. Selain itu, interaksi para aktor perempuan di rumah makan menguatkan kesadaran bersama antara perempuan. Dari sana lahir pula solidaritas antarperempuan dan menginisiasi kegiatan sosial lain seperti arisan para pekerja rumah makan dan pemilik rumah makan. Raewyn Connell (2005) dalam *Masculinities* menegaskan bahwa ruang-ruang feminin yang terbentuk di luar domain maskulin sering menjadi basis bagi perempuan untuk merekonstruksi identitas dan membangun agensi kolektif, meski dalam batas yang ditetapkan patriarki. Proses ini menunjukkan bahwa perempuan tidak hanya sebagai objek pasif, tetapi juga subjek yang aktif menegosiasikan ruang. Kathryn Robinson (2009) dalam studi tentang perempuan Sulawesi menambahkan bahwa arisan dan kelompok tabunan tradisional sering menjadi wadah informal bagi perempuan untuk memperkuat solidaritas dan mengadvokasi kepentingan mereka.

Interaksi antarperempuan di sektor jasa akhirnya membentuk kesadaran atas ketimpangan yang mereka alami, terutama ketika mereka mulai membandingkan upah dan kesempatan dengan laki-laki. Keterbatasan pendapatan di sektor sekunder mungkin memicu inisiatif perempuan untuk menuntut akses ke sektor maritim, terutama jika pendapatan laki-laki tidak mencukupi kebutuhan keluarga. Connell & Messerschmidt (2005) menjelaskan bahwa hegemoni maskulinitas bersifat dinamis perlawanan perempuan mungkin muncul, tetapi seringkali dipadamkan melalui sanksi sosial yang mengembalikan tatanan gender. Di Lappa,



upaya perempuan untuk melamar sebagai nelayan masih dianggap melanggar adat, menunjukkan bahwa ruang negosiasi tetap dibatasi oleh norma kultural. Melissa Marschke (2012) dalam penelitiannya di komunitas pesisir Kamboja menemukan pola serupa: perempuan yang mencoba masuk ke sektor maritim langsung sering dihadang oleh sanksi kultural, meski kontribusi ekonomi mereka di sektor informal diakui.

Meski demikian, Walby (1990) mengingatkan bahwa fleksibilitas patriarki juga mengandung kerentanan: semakin banyak perempuan yang terlibat dalam ekonomi publik, semakin besar potensi transformasi relasi gender. Temuan di TPI Lappa membuktikan bahwa partisipasi ekonomi perempuan, meski terbatas, dapat menjadi batu pijakan untuk menggeser logika dominasi maskulin dalam jangka panjang. Hal ini sejalan dengan teori Connell (2005) tentang gender order yang tidak statis, melainkan terus diperebutkan melalui praktik sehari-hari. Aihwa Ong (2010) dalam konteks Asia Tenggara menambahkan bahwa "perempuan di sektor informal sering menjadi aktor kunci dalam mendorong perubahan sosial melalui strategi ekonomi yang tampak 'kecil' namun berdampak sistemik.

Kesimpulan

Sektor kemaritiman global masih didominasi laki-laki akibat konstruksi budaya yang mengaitkan pekerjaan laut dengan atribut maskulin seperti kekuatan fisik dan keberanian. Perempuan sering tersingkir ke peran informal seperti pengolahan ikan atau perdagangan skala kecil, baik di negara berkembang maupun maju. Di Indonesia, ketimpangan ini tercermin dari 85% pekerja perikanan yang merupakan laki-laki, sementara perempuan terjebak dalam pekerjaan sekunder berupah rendah seperti pengasapan ikan. Budaya patriarki dan mitos lokal—seperti anggapan perempuan di laut membawa sial—memperkuat stereotip gender. Kebijakan pemerintah yang bias gender, seperti pelatihan teknis hanya untuk laki-laki, semakin

meminggirkan potensi perempuan dalam inovasi maritim.

Fenomena di Kelurahan Lappa, Indonesia, menunjukkan dominasi laki-laki mencapai 97% di sektor maritim, sementara perempuan hanya mengisi ruang ekonomi di sekitar Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sebagai pengelola rumah makan atau pedagang eceran. Meski TPI membuka peluang, kepemilikan lahan dan alat produksi tetap dikuasai laki-laki. Penelitian ini menekankan pentingnya kebijakan inklusif—seperti kuota perempuan dalam koperasi nelayan dan pelatihan teknis berbasis gender—untuk mendobrak hegemoni maskulinitas. Contoh sukses di Filipina membuktikan bahwa pemberdayaan perempuan melalui akses kepemilikan dan teknologi mampu meningkatkan produktivitas maritim. Perubahan tidak hanya memerlukan reformasi struktural, tetapi juga dekonstruksi norma budaya yang mengerdilkan peran perempuan, menjadikan kesetaraan gender sebagai kunci pembangunan maritim berkelanjutan.

Rekomendasi

1. Perlu adanya edukasi untuk mendekonstruksi mitos bahwa perempuan "tidak cocok" bekerja di laut, termasuk memperkenalkan contoh perempuan sukses di sektor maritim.
2. Pemerintah perlu menyediakan pelatihan teknis, akses modal, dan infrastruktur ramah perempuan (misalnya kapal dengan fasilitas keselamatan khusus).
3. Membentuk kelompok perempuan nelayan atau koperasi yang memungkinkan mereka terlibat dalam rantai nilai maritim tanpa harus turun ke laut langsung.

Daftar Pustaka

Acker, J. (1990). Hierarchies, jobs, bodies: A



- theory of gendered organizations. *Gender & Society*, 4(2), 139–158.
- Anwar, Z., & Wahyuni, W. (2019). Kemiskinan dan ketimpangan gender di masyarakat pesisir Indonesia [Poverty and gender inequality in Indonesian coastal communities]. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2022). Statistik ketenagakerjaan sektor perikanan 2022 [Fisheries sector employment statistics 2022]. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sinjai (BPS Sinjai). (2022). Profil kemaritiman Kelurahan Lappa 2022 [Maritime profile of Lappa Village 2022]. Sinjai: BPS Sinjai.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sinjai (BPS Kabupaten Sinjai). (2022). Statistik gender Kabupaten Sinjai 2022 [Gender statistics of Sinjai Regency 2022]. Sinjai: BPS Kabupaten Sinjai.
- Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. In J. Richardson (Ed.), *Handbook of theory and research for the sociology of education* (pp. 241–258). Greenwood.
- Bourdieu, P. (2001). *Masculine domination*. Stanford University Press.
- Connell, R. (2005). *Masculinities* (2nd ed.). University of California Press.
- Connell, R., & Messerschmidt, J. W. (2005). Hegemonic masculinity: Rethinking the concept. *Gender & Society*, 19(6), 829–859.
<https://doi.org/10.1177/0891243205278639>
- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Sinjai. (2023). Laporan partisipasi perempuan dalam ekonomi domestik Kelurahan Lappa [Report on women's participation in the domestic economy of Lappa Village]. Sinjai: Dinas PPPA Sinjai.
- Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai. (2023). Data pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lappa 2023 [Lappa Fish Auction Place (TPI) management data 2023]. Sinjai: Dinas Perikanan Sinjai.
- Dinas Perikanan Sinjai. (2023). Laporan pengelolaan TPI Lappa 2023 [Lappa Fish Auction Place management report 2023]. Sinjai: Dinas Perikanan Sinjai.
- Elson, D. (2017). Recognizing, reducing, and redistributing unpaid care work. UN Women.
- Federici, S. (2012). *Revolution at point zero: Housework, reproduction, and feminist struggle*. PM Press.
- Food and Agriculture Organization (FAO). (2020). *The role of women in fisheries: A global assessment*. Rome: FAO.
- Food and Agriculture Organization (FAO). (2020). *The state of world fisheries and aquaculture 2020*. Rome: FAO.
- Fraser, N. (2013). *Fortunes of feminism: From state-managed capitalism to neoliberal crisis*. Verso.
- Gerrard, S. (2021). Women in Norwegian fisheries: Navigating gendered seas. *Maritime Studies*, 20(3), 245–260.
<https://doi.org/10.1007/s40152-021-00233-2>
- Harding, S. (1986). *The science question in feminism*. Cornell University Press.
- Harper, S., Grubb, C., Stiles, M., & Sumaila, U. R. (2020). The myth of the masculine marine: Gender bias in fisheries policies. *Marine Policy*, 121, 104194.
<https://doi.org/10.1016/j.marpol.2020.104194>
- Hochschild, A. (1989). *The second shift: Working parents and the revolution at home*. Viking.
- Ishtiaq, M. (2019). Book review: Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative and mixed methods approaches*. *English Language Teaching*, 12(5), 40–42.
- Kabeer, N. (1999). Resources, agency, achievements: Reflections on the



- measurement of women's empowerment. *Development and Change*, 30(3), 435–464. <https://doi.org/10.1111/1467-7660.00125>
- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). (2023). Statistik sektor kelautan dan perikanan Indonesia 2023 [Indonesian maritime and fisheries sector statistics 2023]. Jakarta: KKP.
- Kusnadi. (2018). Nelayan perempuan: Resistensi dalam budaya patriarki [Female fishers: Resistance in patriarchal culture]. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Mahmood, S. (2005). *Politics of piety: The Islamic revival and the feminist subject*. Princeton University Press.
- Marschke, M. (2012). *Life, fish, and mangroves: Resource governance in coastal Cambodia*. University of Ottawa Press.
- Prasetyawati, A. E. (2021). Feminisasi sektor informal: Perempuan di kawasan pesisir. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 9(2), 112–125.
- Prasetyawati, D. (2021). Kepemilikan lahan dan kesenjangan gender di wilayah pesisir [Land ownership and gender inequality in coastal areas]. Jakarta: LP3ES.
- Resurreccion, B. P., & Ha, T. T. P. (2017). Empowering women through inclusive fisheries cooperatives in the Philippines. *Gender, Technology and Development*, 21(1-2), 69–89. <https://doi.org/10.1080/09718524.2017.1385310>
- Resurreccion, B. P., & Ha, T. T. T. (2017). Persistent women and environment linkages in climate change and sustainable development agendas. *Women's Studies International Forum*, 65, 58–65.
- Robinson, K. (2009). *Gender, Islam, and democracy in Indonesia*. Routledge.
- Scott, J. C. (1985). *Weapons of the weak: Everyday forms of peasant resistance*. Yale University Press.
- Setyawati, L. (2020). *Kebijakan maritim dan partisipasi perempuan: Studi kasus Program Nelayan Andalan [Maritime policy and women's participation: A case study of the Nelayan Andalan Program]*. Jakarta: LIPI Press.
- Setyawati, N. (2020). Perempuan pesisir dan dinamika ruang ekonomi maritim. *Jurnal Perempuan*, 25(3), 45–60.
- UN Women. (2022). *Gender equality in maritime decision-making: A global review*. New York: UN Women.
- Wajcman, J. (1991). *Feminism confronts technology*. Polity Press.
- Walby, S. (1990). From private to public patriarchy: The periodisation of British history. *Women's Studies International Forum*, 13(1-2), 91–104.
- World Bank. (2021). *The hidden tide: Economic losses from gender inequality in fisheries*. Washington, DC: World Bank.
- Young, I. M. (2011). *Justice and the politics of difference*. Princeton University Press.

